

Judul : Pelemahan KPK berlanjut: keterangan direktur penyidikan KPK ke pansus kontraproduktif
Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 2

Pelemahan KPK Berlanjut

Keterangan Direktur Penyidikan KPK ke Pansus Kontraproduktif

[JAKARTA] Upaya sistematis memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut. Keterangan Direktur Penyidikan KPK, Brigjen (Pol) Aris Budiman di hadapan Pansus Hak Angket KPK, dikhawatirkan menambah amunisi untuk semakin menekan lembaga antirasuah itu. Tindakan Aris dinilai kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi yang digencarkan KPK.

Demikian pandangan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, peneliti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur, dan Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko, Kamis (31/8).

Menurut Donal, kehadiran Aris memenuhi panggilan Pansus Angket KPK pada Selasa (29/8), melanggar Peraturan KPK 7/2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK. Setidaknya ada tiga pelanggaran yang dilakukan.

Pertama, terkait integritas, yang menyatakan setiap pegawai KPK harus memiliki komitmen dan loyalitas kepada Komisi serta mengenyampingkan kepentingan pribadi/golongan. Kedatangan Aris ke Pansus KPK merupakan tindakan yang mengedepankan kepentingan pribadinya, sebab hanya untuk melakukan klarifikasi terhadap kasus yang dituduhkan kepadanya.

“Selain itu keterangannya yang mendiskreditkan KPK memperlihatkan dia tidak loyal kepada KPK,” kata Donal.

Kedua, masih terkait integritas, yaitu melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Komisi.

“Keterangan Aris di Pansus justru mencemarkan nama baik Komisi dengan menyatakan adanya friksi dan perpecahan di KPK,” ungkap dia.

Ketiga, terkait profesionalisme yang mengharuskan setiap pegawai KPK patuh dan konsisten terhadap kebijakan dan Standar Operasi Baku. Aris, menurut Donal, tidak patuh terhadap perintah pimpinan yang melarangnya menghadiri Pansus.

“Jika kita melihat Peraturan KPK No 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, jabatan Direktur Penyidikan berada di bawah Deputi Penindakan. Artinya ada dua level pimpinan yang dilampaui oleh Aris Budiman untuk berbicara membawa nama KPK di depan DPR,” jelas Donal.

Kontraproduktif

Sementara itu, Muhamad Isnur mengatakan keterangan Aris Budiman telah mendiskreditkan penyidik senior Novel Baswedan dan juga Wadah Pegawai KPK. “Novel Baswedan sebagai ketua Wadah Pegawai memang pernah mengirim *email* yang keras menolak ditambahnya penyidik dari unsur kepolisian karena meragukan integritas mereka. Hal tersebut seharusnya menjadi urusan internal KPK, bukan Pansus, terlebih *concern* Novel dan Wadah Pegawai sangat beralasan,” ujar Isnur.

Menurutnya, tindakan semacam itu justru kontraproduktif terhadap kerja pemberantasan korupsi yang digencarkan KPK. Karenanya, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi meminta KPK memecat Aris dan mengembalikannya ke institusi kepoli-

sian. "Kami juga berharap KPK segera merekrut penyidik sendiri," ujarnya.

Senada dengan itu, Dadang Trisasongko meminta DPR mendukung KPK untuk hal-hal yang lebih substansial. "Kalau motifnya untuk memperkuat KPK, sebenarnya banyak masalah yang jauh lebih penting yang seharusnya dibahas oleh DPR," ujarnya.

Hal penting dimaksud,

misalnya DPR memberikan dukungan anggaran yang memadai kepada KPK sehingga bisa mempunyai kantor-kantor di daerah. Selain itu, dengan anggaran tersebut, KPK mampu merekrut dan mendidik penyidik internal agar tidak bergantung pada bantuan penyidik dari Polri.

Terkait kehadiran Aris di Pansus Angket KPK, Dadang menilai, hal tersebut jelas bertentangan de-

ngan sikap KPK yang masih mempersoalkan keabsahan Pansus Angket. Apalagi pimpinan KPK sudah melarang Aris hadir di Pansus.

"Jadi, sudah tampak jelas ada subordinasi di sini. Biar KPK yang akan memutuskan apa hukuman internal yang patut diberikan terhadap pelanggaran itu," kata dia.

Lebih lanjut, Dadang menyarankan agar KPK se-

baiknya secara bertahap mulai mengurangi kebergantungannya pada penyidik dari Polri, dengan memperbanyak jumlah penyidik internalnya. Menurut dia, tugas Polri sangat banyak.

"Adanya penyidik dengan latar belakang yang berbeda di dalam KPK, akan selalu menimbulkan risiko kerja," tandasnya. [YUS/A-17]

Terkait hal > 8